

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**



Penulisan Hukum (Skripsi) S1

**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Oleh

PRABOWO CAHYANDARU

NIM : E0008407

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2013

commit to user

Penulisan Hukum (Skripsi)
UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DARAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA

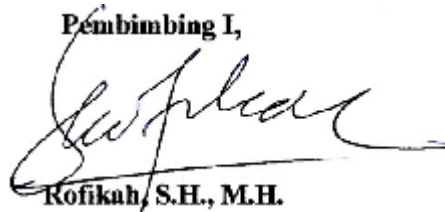
Disusun oleh :
Prabowo Cahyandaru
NIM : E 0008407

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 12 Juli 2013

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Rofikah, S.H., M.H.

NIP. 195512121983032001

Pembimbing II,



Subekti, S.H., M.H.

NIP. 196410221989032002

PENGESAHAN PENGUJI**Penulisan Hukum (Skripsi)****UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DARAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

Oleh
Prabowo Cahyandaru
NIM : E 0008407

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29 Juli 2013

DEWAN PENGUJI

1. **Winarno Budyatmojo, S.H., M.S.** :

Ketua

2. **Subekti, S.H., M.H.** :

Sekretaris

3. **Rofikah, S.H., M.H.** :

Anggota

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

NIP. 19570203 198503 2 001

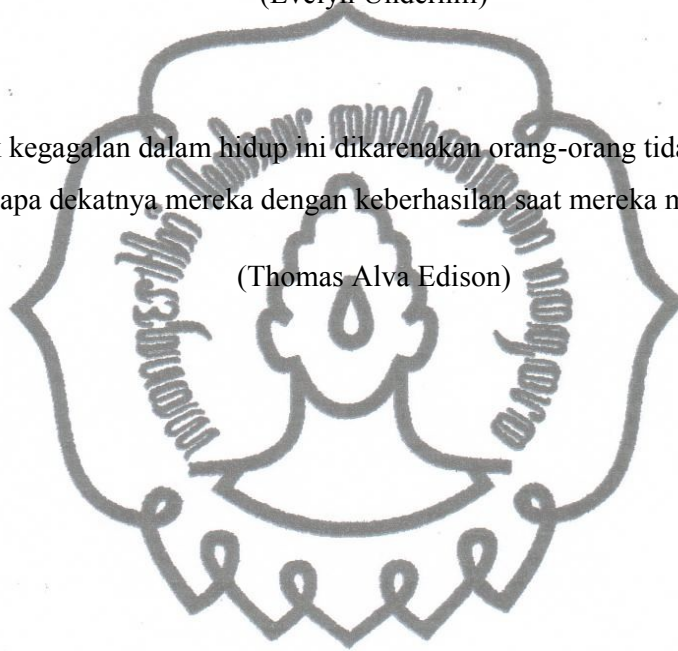
MOTTO

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik

(Evelyn Underhill)

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah

(Thomas Alva Edison)



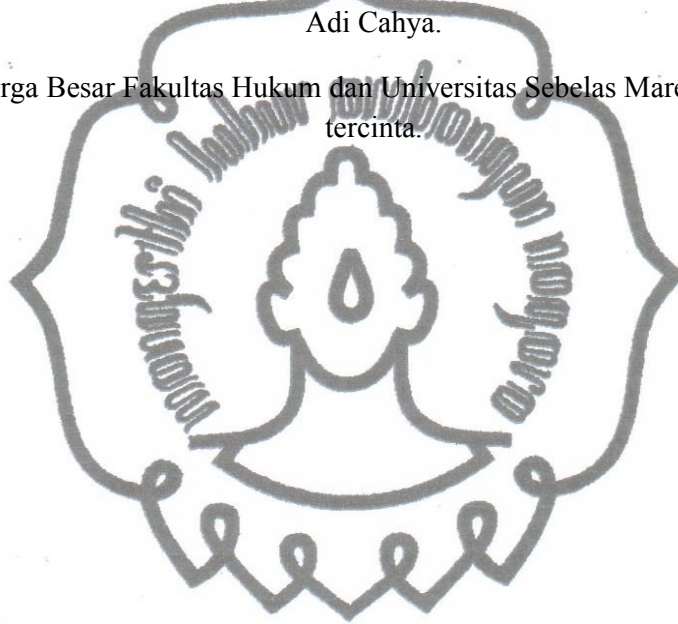
PERSEMBAHAN

Kepada Allah SWT Maha Pemberi Bantuan dan Maha Penolong

Orang Tuaku Tersayang, Bapak Budiharso dan Ibu Sulistyowati Budiharso.

Kakakku dan adikku Tersayang, Mas Anang Sulung Wicaksono dan Adik Wisnu
Adi Cahya.

Keluarga Besar Fakultas Hukum dan Universitas Sebelas Maret Surakarta
tercinta.



KATA PENGANTAR

Mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul : **“UPAYA BNNP DIY DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

Penulisan Hukum (skripsi) ini membahas tentang upaya – upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika berdasarkan Undang – undang No.35 Tahun 2009 di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan terselesaikannya Penulisan Hukum ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu:

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
2. Ibu Rofikah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingannya Sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) dapat selesai.
3. Ibu Subekti, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini.
4. Bapak Ismunarno, S.H.,Mhum., selaku Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama penulis menumpuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebalas Maret Surakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya.

6. Bapak Drs. Budiharso, M.Si. selaku Kepala BNNP DIY yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kantor BNNP DIY
7. Bapak Sumargiono, SST. FT., S.H. selaku Kepala Bagian Pemberantasan BNNP DIY yang telah membantu Penulis memperoleh data.
8. Bapak Bambang Wiryanto, S.Si. selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY yang telah membantu Penulis memperoleh data.
9. Bapak dan Ibuku tercinta yang telah memberi dukungan baik berupa doa, dan dana guna terselesainya skripsi ini.
10. Mas Anang dan Adik Wisnu yang telah memberikan support dan doa guna terselesainya skripsi ini.
11. Bapak Wiryomartono dan teman – teman kost terimakasih atas bantuan dan dukungan doanya.
12. Teman – teman Fakultas Hukum angkatan 2008 terimakasih atas dukungan doanya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka penulis mengharapkan koreksi dan tanggapan, baik berupa saran maupun kritik yang positif dan membangun demi sempurnanya Penulisan Hukum ini.

Penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta sumbangan pada almamater.

Surakarta, 12 Juli 2013

Penulis

Prabowo Cahyandaru

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Sifat Penelitian	7
3. Pendekatan Penelitian	7
4. Jenis dan Sumber Daya Penelitian	8
5. Teknik Pengumpulan Data	8
6. Teknik Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Pengertian dan Dampak Narkotika	11
1.	Pengertian Narkotika	11
2.	Penggolongan Narkotika	11
3.	Dampak Narkotika terhadap Sistem Susunan Saraf	13
4.	Dampak Penyalahgunaan Narkotika	14
B.	Tindak Pidana Narkotika sebagai Kejahatan Transnasional	20
C.	Tindak Pidana Narkotika sebagai Kejahatan Terorganisir	22
D.	Fungsi Hukum dan Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009	26
E.	Kerangka Pemikiran	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Hasil Penelitian	35
1.	Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	35
2.	Upaya BNNP DIY dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	44
B.	Pembahasan	59
1.	Upaya BNNP DIY dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	59

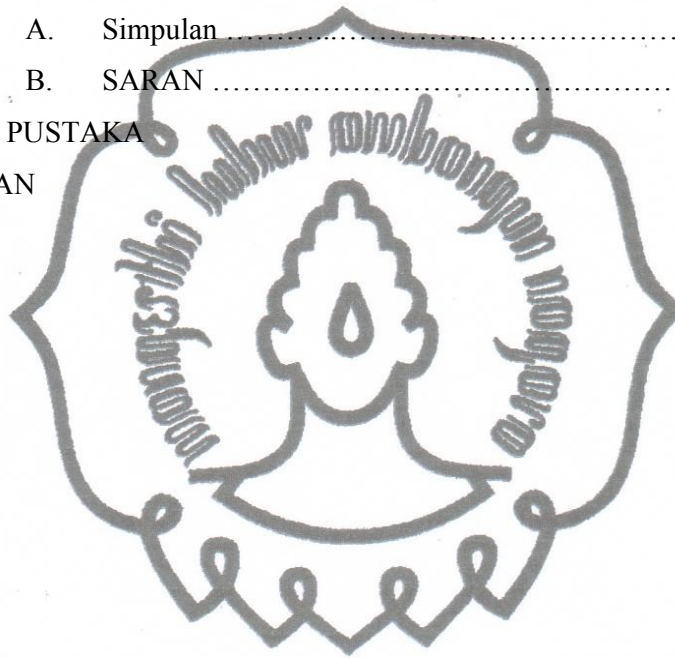
2. Hambatan BNNP DIY dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	80
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	85
B. SARAN	86

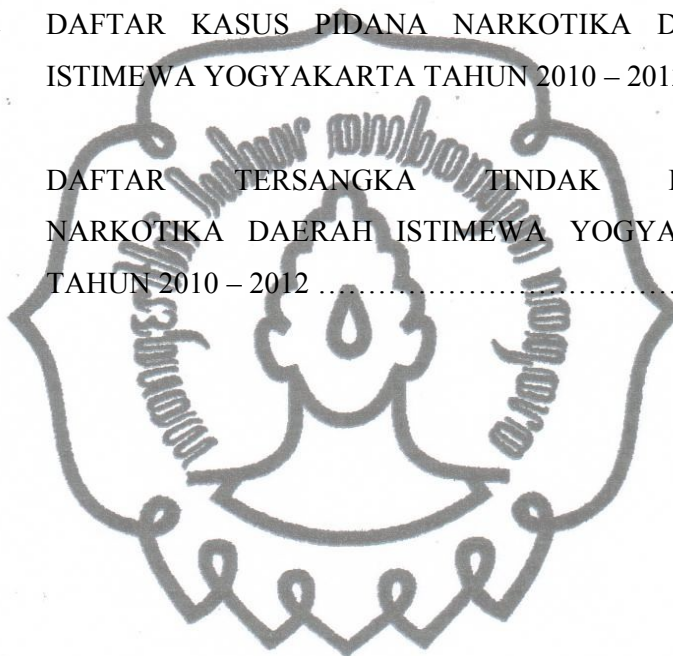
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

TABEL 1	JUMLAH WILAYAH ADMINISTRATIF DIY TAHUN 2010 – 2012	48
TABEL 2	DAFTAR KASUS PIDANA NARKOTIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 – 2012	56
TABEL 3	DAFTAR TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 – 2012	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Model Analisis Interaksi	9
Gambar 2	Visualisasi Organisasi Kejahatan Narkotika	23
Gambar 3	Visualisasi Organisasi Kejahatan Narkotika Bali Nine Th. 2005	24
Gambar 4	Hasil Analisa Data Elektronik Komunikasi Melalui Seluler	25
Gambar 5	Kerangka Pemikiran	34
Gambar 6	Struktur Organisasi BNNP	41



PERNYATAAN

Nama : Prabowo Cahyandaru

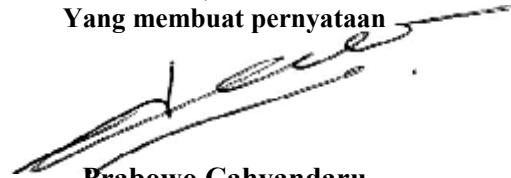
NIM : E0008407

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 12 Juli 2013

Yang membuat pernyataan



Prabowo Cahyandaru

NIM. E0008407

ABSTRAK

PRABOWO CAHYANDARU, E0008407, UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) berdasarkan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, berikut hambatannya, serta hal-hal positif yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan sebagai model.

Penelitian ini dilaksanakan di BNNP DIY merupakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber daya penelitian terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan bahan hukum sekunder yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala BNN, Peraturan Menteri dan dokumen-dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen, kemudian dianalisa secara kualitatif dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui kebijakan pemidanaan (*penal policy*) yang diterapkan melalui upaya pemberantasan atau penegakan hukum, dan kebijakan bukan pemidanaan (*non penal policy*) yang diterapkan melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi. BNNP DIY dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata menerapkan sanksi pidana, namun lebih cenderung untuk menerapkan upaya rehabilitasi agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sembuh. Hambatan BNNP DIY dalam upaya P4GN antara lain masih kekurangan personel, sehingga dalam penugasan sehari-hari terjadi penugasan rangkap. BNNP DIY secara kelembagaan belum didukung adanya Badan Narkotika Kabupaten / Kota, akibatnya lembaga BNNP DIY kurang dapat memberikan pelayanan P4GN kepada masyarakat luas secara cepat, selain itu juga kurang dapat memantau situasi dan kondisi wilayah secara obyektif, akibat selanjutnya adalah permasalahan narkoba sulit untuk bisa dituntaskan dalam waktu dekat.

Kata Kunci: BNNP DIY, P4GN, UU NO. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.

ABSTRACT

PRABOWO CAHYANDARU, E0008407, THE EFFORT OF NATIONAL NARCOTICS BOARD PROVINCE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA IN THE PREVENTION AND ELIMINATION OF THE ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTICS (P4GN) REFER TO ACT 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTIC. Faculty of Law, University of Sebelas Maret.

This research aims to determine the efforts of the National Narcotics Board Province Special Region of Yogyakarta (BNNP DIY) in the prevention and elimination of the abuse and illicit trafficking in narcotics (P4GN) refer to Act Number 35 year 2009 about Narkotic, including the following constraints, as well as the positive things that could be developed as a model.

The research was conducted in BNNP DIY is normative legal research. Research resources consist of primary legal materials in the form of Act Number 35 year 2009 about Narkotic, and secondary legal materials such as Government Regulation, Regulation of the Chief of BNN, Regulation of Minister and other documents that are closely related to the problem. Data Collection technique using study material legal documents, and then analyzed qualitatively with the interactive model.

The result of the research shows that the efforts of BNNP DIY in the prevention and elimination of the abuse and illicit trafficking in narcotics (P4GN) through a penal policy which is implemented through the law enforcement, and not penal policy which is implemented through prevention and rehabilitation. BNNP DIY in his efforts to combat narcotics abuse is not solely apply criminal sanctions, however, are more likely to implement the rehabilitation efforts in order to recover narcotics addicts and the victim of narcotics abusers. BNNP DIY has constraints in an effort of P4GN such as lack of personnel, resulting in the daily job occurs double assignment. BNNP DIY is not supported by the National Narcotics Board Resort or City (BNNK), consequently BNNP DIY less able to provide services to the community quickly in the effort of P4GN, it is also less able to monitor the situation and condition of the region objectively, in the end is a hard narcotics problem to be resolved in the near future.

Keywords: BNNP DIY, P4GN, Act number 35 year 2009 about Narcotic.